

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi/instansi kepada pihak yang memiliki hak baik Pemerintah atau masyarakat luas.¹ Akuntabilitas ini merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan atau pengelolaan keuangan suatu lembaga atau organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan *stakeholder* dari suatu lembaga tersebut. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan.² Akuntabilitas sangat penting sebab hal tersebut dapat sebagai pendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja suatu instansi diantaranya adalah instansi pendidikan/sekolah.

Isu akuntabilitas akhir-akhir ini semakin gencar dibicarakan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu, bahkan resonansinya semakin keras.³ Oleh karena itu, bagi lembaga-lembaga pendidikan hal ini mulai harus disadari dan disikapi dengan melakukan redesain sistem yang

¹ Fenny Trisnawati, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kota Pekanbaru," *Jurnal Al-Iqtishad* 1, no. 14 (2018): hlm., 9.

² Syerly, R. Hamdani Harahap, dan E. Harso Kardhinata, "Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 8 (2018): hlm., 91.

³ Trisnawati, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kota Pekanbaru," hlm., 9.

mampu menjawab tuntutan tersebut, caranya adalah dengan mengembangkan pengelolaan keuangan Sekolah yang akuntabel, sebab akuntabilitas suatu lembaga bergantung kepada kemampuan suatu lembaga pendidikan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik atau disebut juga akuntabilitas keuangan.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu entitas untuk melakukan serangkaian kerja demi tercapainya tujuan tertentu.⁴ Pengelolaan keuangan atau disebut juga dengan manajemen keuangan merupakan kegiatan dalam mengatur jalannya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik maka tujuannya pun akan dapat tercapai.

Pengelolaan keuangan dalam pendidikan meliputi perencanaan kegiatan dan anggaran, penggunaan atau pemanfaatan, dan laporan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang sudah dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan dan pembangunan Sekolah, sehingga dalam hal ini dapat menunjukkan tertib administrasi keuangan serta pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.⁵ Jadi pengelolaan keuangan dalam suatu pendidikan harus dikelola dengan baik sehingga dapat tercipta administrasi yang tertib.

⁴ Ristya Dwi Anggraini, "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya," *Kebijakan dan Manajemen Publik* 1, no. 2 (2013): hlm., 204.

⁵ Faisyal Ammar dan Bustamam, "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus pada SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul ULUM di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4, no. 1 (2019): hlm., 118.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program Pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 Tahun.⁶ Program BOS dikomandani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaan, penyaluran, dan pengelolaannya wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis tiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta untuk memperlancar proses pengelolaan BOS pada Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu, dan tepat guna.⁷

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS sangat penting sebab sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada pihak *stakeholder* baik Pemerintah, Orang Tua Siswa dan pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh Sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa Sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkinerja dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi, Sekolah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan sehingga dapat tercipta laporan keuangan yang akuntabel.

Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat 10 Madrasah Tsanawiyah yang menerima dana BOS. Diantaranya adalah MTs

⁶ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah* (Jakarta, 2019), hlm., 3.

⁷ *Ibid*, 2.

Nurur Rahmah, MTs al-Hikmah, MTs Nurur Jadid, MTs Hidayatut Thalibin, MTs Da'watul Islamiyah, MTs al-Hidayah, MTs al-Falah, MTs Tarbiyah Islamiyah, MTs Hidayatul Ulum, dan MTs Raudatur Rahmah.

Dana BOS yang diterima oleh suatu Madrasah harus dikelola secara akuntabel. Namun nyatanya masih terdapat berapa madrasah di Desa Pragaan Daya yang ditemukan beberapa kejanggalan atau permasalahan terkait *mark up* data dalam laporan keuangannya, sehingga menyebabkan suatu Madrasah harus mengembalikan dana BOS yang sudah dicairkan oleh Pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat madrasah yang tidak mengelola laporan keuangan dana BOS secara akuntabel

MTs Nurur Rahmah ini merupakan Madrasah yang memiliki jumlah siswa terbanyak dan penerima dana BOS terbanyak di Desa Pragaan Daya, sebab besar biaya satuan BOS yang diterima oleh setiap Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswanya. Jumlah siswa di MTs Nurur Rahmah adalah sebanyak 115 siswa, sementara untuk jumlah siswa di MTs yang lain rata-rata hanya terdapat 60 siswa.

Jumlah dana BOS yang diterima pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :⁸

Tabel 1.1
Dana BOS Tahun 2020

NO	Kelas	Jumlah Siswa	Dana Tahun 2020
1	VII (1 MTs)	34	Rp. 37.4000.000
2	VIII (2 MTs)	42	Rp. 46.200.000
3	IX (3 MTs)	39	Rp. 42.900.000
Jumlah		115	Rp. 126.500.000

⁸ Busri Isma'el, Kepala Sekolah MTs Nurur Rahmah, Wawancara langsung, (27 Juli 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa MTs Nurur Rahmah merupakan Madrasah yang memiliki jumlah siswa terbanyak dan penerima dana BOS terbanyak di Desa Pragaan Daya. Hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurur Rahmah Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis merupakan kegunaan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara konsep teori. Kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Pendidikan serta agar dapat menjadi tambahan sumber pengetahuan/pedoman bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan dana BOS di berbagai Sekolah/Madrasah.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, penelitian ini juga memberikan kegunaan secara praktis yaitu kegunaan yang berkaitan dengan para pihak terkait. Adapun kegunaan secara praktisnya yaitu:

a. Bagi MTs Nurur Rahmah

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan pengetahuan serta bahan masukan bagi MTs Nurur Rahmah, Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk semakin memperbaiki pengelolaan dana BOS sehingga dapat tercipta laporan keuangan yang akuntabel.

b. Bagi Program Studi

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu akuntansi khususnya di bidang Akuntansi Sektor Pendidikan serta diharapkan

dapat memberikan kontribusi tambahan referensi kepada mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi.

c. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan maupun pengalaman dengan praktik di lapangan sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari perihal pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini dibutuhkan definisi istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan terhadap judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan antara lain:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan suatu entitas dalam mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan baik kepada Pemerintah maupun masyarakat luas. Jadi, akuntabilitas keuangan adalah kegiatan pertanggungjawaban suatu lembaga atas keuangan berupa dana subsidi dari Pemerintah salah satunya adalah dana BOS.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dalam suatu entitas yang kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan/penggunaan dana (salah satu contohnya adalah dana BOS), pembukuan, dan proses laporan pertanggungjawaban sehingga suatu entitas dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasional non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar 9 Tahun, sehingga program wajib belajar 9 Tahun dapat terlaksanakan dengan baik.